



PENGELOLAAN SAMPAH

Bola Panas Sampah Menggelinding di DI Yogyakarta

Salah satu hal yang dikhawatirkan pascapenutupan Tempat Pemrosesan Akhir Piyungan di DI Yogyakarta akhirnya terjadi. Akibat belum semua sampah bisa ditangani pemerintah tiga kabupaten/kota, sebagian limbah itu "meluber" menjadi bola panas yang menggelinding liar.

Salah satu yang terimbas "bola panas" itu adalah Kabupaten Gunungkidul. Dalam sepekan terakhir, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul menemukan tiga lahan pribadi dipakai sebagai tempat pembuangan sampah ilegal di daerah itu.

Pemilik lahan diduga bekerja sama dengan oknum penyedia layanan pengangkutan sampah perseorangan yang beroperasi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Ketiga daerah itu adalah yang terdampak langsung oleh penutupan TPA Piyungan di Bantul.

Sejak pembuangan sampah ke TPA Piyungan dibatasi pada tahun lalu hingga akhirnya ditutup total per 1 Mei 2024 karena telah penuh, para pengangkut sampah di ketiga daerah itu kelabakan. Di sisi lain, rencana pengolahan sampah secara mandiri yang dilakukan pemerintah kota/kabupaten belum sepenuhnya efektif.

Alhasil, sampah pun bak bergerak liar mencari solusinya sendiri. Gunungkidul menjadi sasaran karena letaknya yang relatif dekat dan berbatasan langsung dengan Sleman dan Bantul. Selain itu, tak sulit mencari lokasi yang terpercik dan jauh dari permukiman di kabupaten yang luasnya hampir separuh Pro-

vinsi DIY tersebut.

Dua dari tiga lahan pembuangan itu memanfaatkan area bekas tambang batu di Kecamatan Paliyan. Satu lahan lagi berlokasi di sebuah hutan di Kecamatan Purwosari. Sampah dibawa ke lahan-lahan tersebut dengan truk.

Kepala DLH Gunungkidul Hary Sukmono mengatakan, pihaknya langsung menutup ketiga tempat itu. Meski berstatus lahan pribadi, aturan jelas tak memperbolehkan sampah dibuang serampangan seperti itu, apalagi dalam skala besar.

"Sebetulnya, sejak pembatasan TPA Piyungan tahun lalu, kami sudah mengantisipasi masuknya sampah ke Gunungkidul dengan pengawasan melalui perangkat desa. Namun, namanya juga orang kucing-kucingan, ya, ada yang bisa masuk juga," katanya.

Dengan temuan ini, Hary mengungkapkan, pengawasan akan diperketat, terutama di jalur-jalur masuk ke Gunungkidul. Perangkat desa dan kecamatan dilibatkan untuk mengawasi wilayah masing-masing.

Puncak gunung es

Kasus yang terungkap di Gunungkidul ini boleh jadi hanya fenomena puncak gunung es. Sangat dimungkinkan aktivitas serupa juga terjadi di lokasi-lokasi lain dengan skala sama atau lebih kecil.

Dosen teknik lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Hijrah Purnama Putra, mengatakan, selain di Gunungkidul, dirinya mendapat informasi banyak lahan yang dipakai untuk pem-



Tukang becak melintas di depan tempat pembuangan sementara (TPS) Pagar Ngasem, Yogyakarta, Sabtu (4/5/2024). TPS ini untuk sementara berhenti beroperasi.

buangan sampah ilegal seperti itu. "Ini berpotensi menjadi pencemaran lingkungan yang luar biasa jika tak segera ditindak pemerintah," ujarnya.

Namun, upaya penindakan jadi dilema karena ketiga pemerintah kabupaten/kota belum memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai setelah TPA Piyungan ditutup. Padahal, sampah tak berhenti dihasilkan setiap hari.

Sistem pengangkutan sampah yang terbuka untuk swasta perseorangan juga jadi masalah lain. Pasalnya, tak ada pendataan jelas terkait jumlah dan cara operasi penyedia jasa itu. "Mereka buang sampahnya ke

mana juga tidak diketahui," kata Hijrah.

Pengalaman negara-negara maju, seperti Jepang, Jerman, dan Swedia, menurut dia, bisa diadopsi. Di negara-negara itu, semua warga terlayani oleh sistem pengangkutan sampah yang dikelola pemerintah.

Hal ini membuat pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah terkontrol. Saat hendak mengubah sistem pengelolaan sampah seperti yang terjadi di DIY saat ini, proses transisinya pun relatif lebih mudah karena semua masih berada dalam kendali pemerintah.

"Masalahnya di Indonesia,

termasuk DIY, belum semua warga terlayani seperti itu. Biasanya hanya di wilayah perkotaan saja, itu pun tidak 100 persen," kata Hijrah.

Pembakaran sampah

Bola liar lain yang saat ini muncul karena sampah tak tertangani dalam sistem adalah aktivitas pembakaran sampah oleh warga. Meski efektif menmusnahkan sampah, hal ini menimbulkan polusi udara dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Terkait ini, peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM), Iqmal Tahir, mengata-

kan, potensi bahaya makin tinggi jika yang dibakar adalah sampah berbahan plastik atau styrofoam. "Bahan-bahan itu kalau dibakar mengeluarkan senyawa dioksin yang bisa menyebabkan kanker bagi manusia," ujar dosen kimia ini.

Dia menjelaskan, sebenarnya pemusnahan sampah dengan metode pembakaran bisa aman selama memakai teknologi dan prosedur yang tepat. Pembakaran dilakukan dengan mesin insinerator bersuhu tinggi dan asap sisa pembakarannya diproses sehingga tak berbahaya lagi.

Teknologi ini bisa menjadi alternatif pengelolaan sampah bagi pemerintah daerah. Namun, Iqmal mengatakan, metode ini butuh investasi dan biaya operasional tinggi.

Perihal insinerator ini juga sempat disinggung Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Baharjo pada rapat koordinasi bertema pengelolaan sampah yang digelar Pemda DIY di Yogyakarta, Selasa (7/5/2024). Rapat itu dihadiri Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati.

Yogyakarta baru memiliki satu fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Nitikan yang beroperasi dengan kapasitas olah 75 ton per hari. TPST itu mengolah sampah menjadi bahan bakar industri semen berupa *refuse derived fuel* (RDF) dan pupuk kompos.

Terdapat dua TPST serupa yang masih dalam penyelesaian,

yakni TPST Kranon berkapasitas 40-45 ton sampah per hari dan TPST Karangmiri dengan kapasitas 25-30 ton per hari. Artinya, total kapasitas maksimal ketiga TPST itu baru 150 ton per hari. Padahal, volume sampah yang harus dikelola di Ibu kota DIY itu sebanyak 200 ton per hari.

Oleh karena itu, Singgih menyanjikan kepada Rosa perihal teknologi pengolahan sampah yang sesuai untuk perkotaan padat penduduk seperti Yogyakarta, tapi tak menimbulkan dampak negatif yang besar. "Kalau kita pilih insinerator, pasti tuntas (permasalahan sampah), tapi ada dampak lain, misalnya pencemaran udara," ucap Singgih.

Menanggapi itu, Rosa menjelaskan, insinerator memang bisa menjadi alternatif penanganan sampah di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Namun, dia menegaskan, diperlukan kajian mendalam sebelum menerapkan metode ini, tidak boleh sembarangan.

"Teknologinya harus bagus, tidak boleh ada emisi, dan harus dipastikan bahwa sampah yang dibakar tidak mengandung limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) karena itu penanganannya berbeda," katanya.

Selain menggenjot upaya penanganan di hilir, pengurangan sampah di hulu juga menjadi elemen penting. Hijrah dan Iqmal pun sepakat, masyarakat harus turut berperan mengurangi volume sampah dari rumah masing-masing. Sampah menjadi urusan bersama yang harus diatasi bersama-sama pula.

(MOHAMAD FINAL DAENG)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005